

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
42 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IMUNISASI  
(STUDI KASUS PADA PUSKESMAS LEMBANG KECAMATAN  
LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat sarjana magister**

**Program Studi Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



**diajukan oleh  
Ayu Hendrati Rahayu  
NIM 12.93.0012**

**FAKULTAS PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2015**

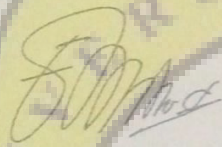
TESIS

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR. 42  
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IMUNISASI  
(STUDI KASUS PADA PUSKESMAS LEMBANG KECAMATAN  
LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT)

diajukan oleh  
Ayu Hendrati Rahayu  
NIM 12.93.0012

telah di setujui oleh:

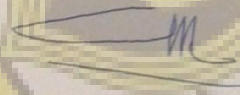
Pembimbing Utama



Dr. Endang Wahyati, SH.MH

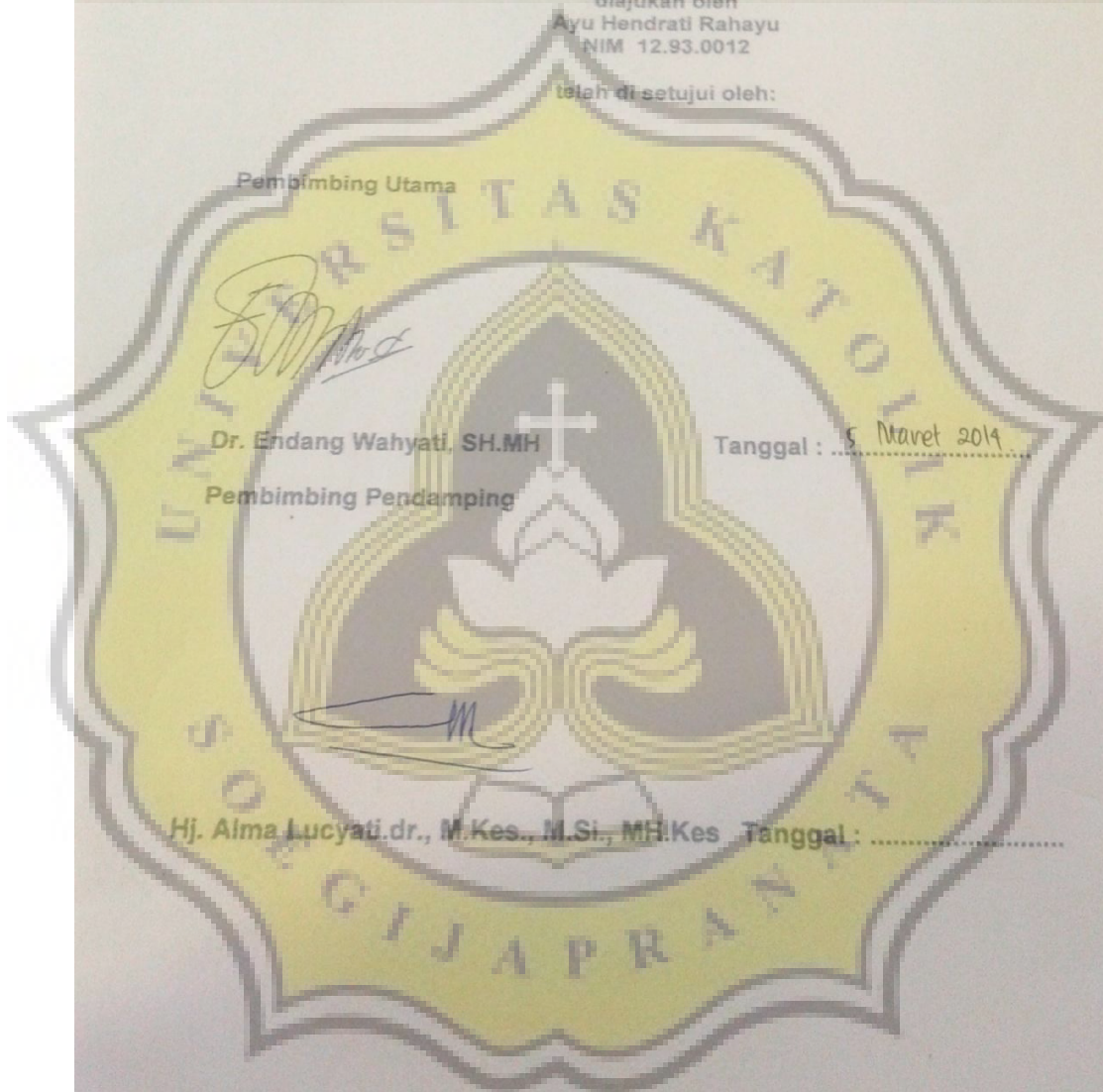
Tanggal : 5 Maret 2014

Pembimbing Pendamping



Hj. Alma Lucyati dr., M.Kes., M.Si., MH.Kes

Tanggal : .....





**UNIKA**  
UNIVERSITAS KATOLIK  
SOEGIJAPRANATA

Program Pascasarjana  
Magister Hukum Kesehatan

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. 024-8441555 (hunting) Fax. 024-8445265. 8415429  
e-mail : unika@unika.ac.id http : //www.unika.ac.id

**PENGESAHAN**

Tesis di susun oleh :

Nama : **AYU HENDRATI RAHAYU**

Nim : **12.93.0012**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 7 Maret 2015

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. **Dr. Endang Wahyati, SH., MH** (.....)
2. **dr. Alma Lucyati, MKes., MSi., MH.Kes** (.....)
3. **Joni Minulyo, SH., MHum** (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 7 Maret 2015



(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)

Ketua Program Pascasarjana  
Magister Hukum

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya kepada penulis sehingga penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR. 42 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IMUNISASI (STUDI KASUS PADA PUSKESMAS LEMBANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT)”**.

Angka Kematian Bayi (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKABA) yang masih tinggi merupakan hambatan utama dalam pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Salah satu upaya dalam penurunan AKI dan AKABA adalah dengan program imunisasi. Penyelenggaraan imunisasi ini merupakan upaya kesehatan pencegahan yang dikelola langsung oleh Puskesmas. Di dalam penyelenggaraan imunisasi ini harus memiliki standar operasional sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat pelanggaran yang dapat merugikan pelanggan pelayanan kesehatan maupun tenaga kesehatannya itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan menganalisis ketentuan peraturan tentang penyelenggaraan imunisasi dan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, serta faktor yuridis dan sosiologis dalam pelaksanaan imunisasi di Puskesmas Kecamatan Lembang Bandung Barat.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah memberikan



kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan.

2. Thomas Budi Santosa, M.Si., Ed.D selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti SH, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberi kesempatan penulis mengikuti perkuliahan di Pascasarjana Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi,SH. selaku Guru Besar di Pascasarjana Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Dr. Endang Wahyati., S.H., M.H sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam memberikan masukan dan juga perbaikan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Hj. Alma Lucyati.dr., M.Kes., M.Si., MH.Kes sebagai pembimbing II yang telah banyak membimbing dan membantu saya dalam memberikan masukan dan juga perbaikan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Joni Minulyo, SH., MH sebagai Dosen penguji yang telah banyak membantu dan memberikan saran untuk perbaikan penyusunan tesis ini.
8. Seluruh Staf pengajar dan Staf Sekretariat Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membantu kelancaran selama pendidikan.
9. Kedua orangtua tercinta Ayahanda H. M. Sukirman dan Ibunda Hj. NC. Setya Ningrum yang selalu memberi dukungan dan tak pernah lelah berdoa.
10. Yoka Tri Hutomo., S.Kep., Ners suami tercinta dan semua keluarga yang selalu memberi doa dan dorongan serta pengertian selama saya menempuh Magister Hukum Kesehatan hingga tesis ini dapat selesai.

11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat untuk terselesainya pendidikan ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, tetapi penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Februari 2015

Ayu Hendrati Rahayu



## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
F. METODE PENELITIAN .....	11
G. PENYAJIAN TESIS .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. PEMBANGUNAN KESEHATAN.....	20
B. HAK KESEHATAN.....	21
C. UPAYA PREVENTIF.....	23
D. TENAGA KESEHATAN BIDAN.....	25
E. PELAYANAN IMUNISASI DI PUSKESMAS.....	27
F. KEBIJAKAN TENTANG IMUNISASI .....	31
G. PERATURAN MENTERI .....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN .....	35
B. HASIL WAWANCARA.....	38
C. PEMBAHASAN.....	44
1. Ketentuan Pelaksanaan Imunisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.....	44
2. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi Di Puskesmas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat .....	75
3. Faktor Yuridis dan Sosiologis yang Mempengaruhi	

Implementasi Penyelenggaraan Imunisasi.....	81
BAB IV PENUTUP.....	87
A. KESIMPULAN.....	87
B. SARAN.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	





## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ayu Hendrati Rahayu, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 12.93.0012,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Maret 2015

Ayu Hendrati Rahayu

## ABSTRAK

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah untuk menurunkan Angka Kematian Bayi dan Balita yaitu dengan upaya pencegahan berupa imunisasi. Penyelenggaraan imunisasi ini merupakan upaya kesehatan pencegahan yang dikelola langsung oleh Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi dibuat dengan tujuan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program imunisasi di Indonesia.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis/sosiologis, yaitu menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu tentang implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi di Puskesmas Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan imunisasi di Puskesmas Lembang kurang sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan imunisasi yang berlaku. Faktor yuridis dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan imunisasi di Puskesmas Lembang yaitu terdapat ketentuan dasar hukum dalam kebijakan penyelenggaraan imunisasi yang tidak sesuai dan perlu adanya pembuatan peraturan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Tugas dan Persetujuan Medik tentang Imunisasi sedangkan faktor sosiologisnya adalah pendanaan dan sarana prasarana, tenaga pengelola dan Hak Asasi Manusia.

Kata kunci:

Implementasi, Peraturan, Puskesmas, Penyelenggaraan Imunisasi.

## ABSTRACT

One of the objectives of Law Number 36 of 2009 on Health is to lower the infant mortality rate and Toddlers is by prevention in the form of immunization. Implementation of this immunization is a preventive health efforts are managed directly by the health center. Minister of Health Regulation Number 42 Year 2013 on the Implementation of Immunization created with the aim to be used as guidelines in the implementation of the immunization program in Indonesia.

The approach used in this study is the approach yuiridis / sociological, which describe the overall problems that are the focus of this research, which is about the implementation of the Regulation of the Minister of Health No. 42 of 2013 on the Implementation of Immunization in Lembang district health center Lembang, West Bandung regency.

The results showed that the implementation of immunization in health centers Lembang less in accordance with the applicable policies immunization administration. Juridical factor in the implementation of immunization policy implementation in Lembang health center which contained the basic provisions of the law in the implementation of immunization policies are not appropriate and the need for rulemaking on Standard Operating Procedures (SOP), the Letter of Assignment and the Agreement on Immunization Medical whereas sociological factors are funding and infrastructure, personnel managers and Human Rights.

Keywords:

Implementation, Regulations, Health Center, Operation Immunization.